
Tata Kelola Perkotaan dan Ketahanan Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Kualitatif**Susan Purnama, Fitriani Reyta, Bob Foster, Johnson Sinaga**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email: susanpurnama@unibi.ac.id; fitrianiireyta@unibi.ac.id; bobriset@unibi.ac.id;
johnsonsinaga@unibi.ac.id

Diterima:
17 April 2024Diterima Setelah Revisi:
24 April 2024Dipublikasikan:
30 April 2024

Abstrak

Masyarakat perkotaan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya memperkuat ketahanan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap hubungan antara ketahanan ekonomi dan tata kelola perkotaan yang baik di Indonesia, khususnya kota Bandung dalam bidang kebijakan penyaluran kredit. Temuan pada penelitian ini dikonseptualisasikan secara deskripsi kualitatif. Berdasarkan temuan yang diperoleh, penerapan *good urban governance* di bidang program kredit korporasi masih belum optimal dan masih diperlukan pengembangan lebih lanjut pada kebijakan dan pengawasan terhadap petugas penyalur dana, lembaga penyalur dan penerima dukungan keuangan. Masih ada oknum yang menyelewengkan dana. Artinya masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan salah satu prinsip transparansi belum tercapai. Implikasi manajerial bagi pemerintah kota Bandung adalah peningkatan penyaluran kredit ke sektor produktif khususnya sektor jasa, menambahkan agunan sebelum penyaluran kredit, dan peningkatan mitigasi resiko kredit terhadap debitur muda, debitur berpenghasilan menengah (Rp 10-20 juta/bulan), dan debitur yang dikenai suku bunga yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Penyaluran Kredit, Usaha Mikro Kecil Menengah, Kredit Usaha Rakyat, Ketahanan, Perekonomian, Kebijakan, Tata Kelola.

Abstract

Urban communities face various challenges, one of which is strengthening economic resilience. The aim of this research is to reveal the relationship between economic resilience and good urban governance in Indonesia, especially the City of Bandung in the field of credit distribution policy. The findings in this research were conceptualized using qualitative descriptions. Based on the findings obtained, the implementation of good urban governance in the field of corporate credit programs is still not optimal and further development of policies and supervision of fund distribution officers, channeling institutions and recipients of financial support is still needed. The managerial implications for the Bandung city government are increasing credit distribution to the productive sector, especially the service sector, adding collateral before credit distribution, and increasing credit risk mitigation for young debtors, medium freeze debtors (Rp. 10-20 million/month), and debtors subject to interest rates. higher interest.

Keywords: Credit Distribution, Micro, Small and Medium Enterprises, People's Business Credit, Resilience, Economy, Policy, Governance.

1 PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah pelayanan publik (dalam terciptanya keadilan dalam masyarakat, khususnya dalam akses terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah). Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 mengenai tugas dan wewenang pemerintahan daerah menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan bergerak yang lebih besar dalam pengembangan kebijakan dan peraturan daerah, termasuk perizinan UMKM, dengan melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan pemahaman dan kebutuhan masyarakat setempat. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, model pemerintahan daerah telah berkembang dari model sebelumnya yang mengikuti model efisiensi struktural menjadi model demokratis. Penerapan model demokrasi berarti bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah memerlukan partisipasi dan kemandirian masyarakat lokal, tanpa mengabaikan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengelolaan perkotaan yang baik merupakan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan perkotaan secara efektif. Hal ini mungkin terjadi dan efektif ketika pemerintah yang bertanggung jawab bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat (Latifa, 2013). Beberapa prinsip dijadikan indikator untuk mempertimbangkan peran pemerintah dalam melaksanakan perencanaan kota yang baik dalam pelayanan perizinan dan investasi terpadu Kota Bandung, keberlanjutan, subsidiaritas, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, dan masyarakat sipil. Partisipasi, kewarganegaraan, dan keamanan terjamin bila norma-norma ini saling bergantung dan saling memperkuat. Waldt *et al.* (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara tata kelola perkotaan dan ketahanan perkotaan (Urbanresiliencehub, 2024).

Pemerintah kota harus meningkatkan ketahanan masyarakat perkotaan melalui pengembangan dan perencanaan skenario perkotaan yang efektif, perlindungan lingkungan, dan penggunaan sumber daya yang langka secara optimal. Ketahanan perkotaan tidak hanya berfokus pada ketahanan kota-kota besar, namun juga mencakup kota-kota kecil dan kawasan pemukiman kecil. Secara khusus, hal ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat perkotaan untuk menyerap guncangan dan tekanan di masa depan terhadap sistem dan infrastruktur sosial, ekonomi, dan teknologi mereka untuk mempertahankan fungsi, struktur, sistem, dan identitas yang sama.

Obeng-Odoom (2012) menunjukkan bahwa beragamnya aspek, konteks, dan penerapan istilah “tata kelola perkotaan” membuat istilah “tata kelola kota” sulit untuk didefinisikan. Yang mengejutkan, situasi ini terjadi di negara-negara berkembang. Meskipun beberapa penulis berfokus pada aspek perencanaan tata ruang ketika mengkonsep tata kelola kota, Dewet berpendapat bahwa meskipun beberapa penulis berfokus pada aspek perencanaan tata ruang, desentralisasi kekuasaan, kewirausahaan lokal (seperti peluang untuk menarik investasi), pembangunan ekonomi, dan demokratisasi lokal (Beberapa Para penulis mengatakan bahwa beberapa penulis berfokus pada isu-isu lokal (misalnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan lokal). Tata kelola perkotaan berfokus pada peran kemitraan regional dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi dan politik masyarakat perkotaan dari perspektif pembangunan berkelanjutan (Maloba & Auriacombe, 2019).

Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan perangkat teknologi dan penerapan prinsip ketahanan perkotaan. Auriacombe & Walt (2021) menggambarkan tata kelola perkotaan sebagai strategi seluruh kota untuk meningkatkan kontribusi kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, tata kelola perkotaan merupakan istilah luas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan berbagai kebijakan untuk memperpendek jalur penularan pandemi COVID-19. Namun kebijakan tersebut menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga (RT) dan konsumsi lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga (LNPRRT), yang keduanya berdampak signifikan terhadap penurunan produk domestik bruto (PDB). Situasi yang terjadi menyebabkan konsumsi Indonesia tidak terkendali, dengan konsumsi rumah tangga (RT) menurun

dari 5,04 persen menjadi -2,63 persen dan konsumsi rumah tangga nirlaba (LNPR) turun dari 10,62 persen menjadi -4,29 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% pada tahun 2020. Hal ini akan membuat pembangunan perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan perekonomian Indonesia akan mengalami deflasi atau resesi yang signifikan pada tahun 2020. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan perangkat teknologi dan penerapan prinsip ketahanan perkotaan.

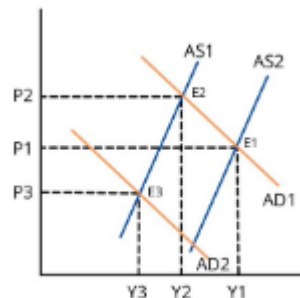
Waldt (2022) menggambarkan tata kelola perkotaan sebagai strategi seluruh kota untuk meningkatkan kontribusi kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, tata kelola perkotaan merupakan istilah luas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

Pandemi penyakit virus corona (Covid-19) telah memberikan dampak yang parah terhadap perekonomian Indonesia sejak triwulan II tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya aturan pembatasan sosial yang meluas (PSBB) yang menerapkan lockdown di beberapa kota dengan tujuan memutus rantai penularan COVID-19. Peraturan ini menyebabkan semakin menurunnya perekonomian pada usaha formal dan informal. Akibat krisis ekonomi, perusahaan tidak mampu membayar upah yang seharusnya, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, penurunan ini menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar atau bangkrut. Gibson & Olivia (2020) menyatakan bahwa perekonomian global telah mengalami perlambatan sejak Februari 2020 akibat penyebaran global infeksi virus corona baru yang berasal dari Tiongkok. Indonesia juga tidak kebal terhadap virus ini. Dampak virus dan respons perekonomian memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97% pada triwulan I-2020, -5,32% pada triwulan II, -3,49% pada triwulan III, dan -3,49% pada triwulan III-2020, kuartal keempat tahun 2020 sebesar -3,49%, 49%, -2,19%. Penurunan tajam perekonomian nasional pada kuartal II ini disebabkan dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai kota di Indonesia yang mulai diterapkan pada awal April 2020.

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan konsumsi. Selain konsumsi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Pendapatan konsumsi industri penerbangan berdampak besar terhadap penurunan selama pandemi. Adanya aturan PSBB membatasi kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan melalui udara. Terlihat pendapatan sektor jasa penerbangan mengalami penurunan lebih dari Rp200 miliar. Wisatawan domestik dan internasional tidak dapat melakukan kunjungan wisata ke Indonesia karena terbatasnya akses transportasi udara. Hal ini berdampak besar pada Kota Bandung, yang sebagian besar pendapatannya berasal dari wisatawan. Hal ini terlihat dari pendapatan hotel dan restoran yang turun sekitar 50 persen dari biasanya. Ekonom menilai deflasi pada tahun 2020 adalah hal yang wajar akibat pandemi virus corona. Deflasi tidak hanya disebabkan oleh penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK), tetapi juga peningkatan pengangguran. Faktanya, Indonesia mengalami deflasi dengan tingkat inflasi sebesar 1,68%, yang merupakan tingkat minimum yang jauh dari target pemerintah yang tercantum dalam PMK No. 124/PMK.010/2017.

Akibat pandemi ini, Indonesia mengalami guncangan pasokan dan permintaan. Berdasarkan kurva di bawah, Indonesia mengalami guncangan penawaran dan permintaan akibat pandemi ini. Guncangan pasokan ini disebabkan oleh penerapan kebijakan PSBB dan berdampak pada kenaikan angka pengangguran. Karena angkatan kerja yang dibutuhkan mengalami penurunan, maka kurva AS 1 bergeser ke kiri dan menjadi kurva AS 2. Situasi permintaan stok ini disebabkan oleh tindakan pemerintah yang tidak jelas dalam memberikan kebijakan ekonomi yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, dan masyarakat yang terkena dampak mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan masyarakat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, investor pasti akan sangat enggan untuk berinvestasi hingga situasi kembali normal. Kondisi permintaan persediaan ini menyebabkan kurva AD 1 miring ke kiri menuju AD 2. Terlihat dari kurva di atas, situasi produksi dimulai dari Y 1 hingga Y 2 dan berakhir di Y 3, dengan produksi

bergerak semakin ke kiri, atau menurun. Artinya, pendapatan pemerintah pada tahun 2020 akan mengalami penurunan permintaan dan perekonomian permintaan akan menurun. Dapat disimpulkan bahwa situasi pandemi COVID-19 saat ini telah memperburuk situasi perekonomian Indonesia secara signifikan (Kemenkeu RI, 2022).



Gambar 1. Grafik Situasi Perekonomian Indonesia
Sumber : Kementerian Keuangan RI (2022)

Guncangan pasokan ini disebabkan oleh penerapan pembatasan sosial berskala besar dan berdampak pada kenaikan angka pengangguran. Akibat penurunan permintaan tenaga kerja maka kurva AS1 bergeser ke kiri dan menjadi kurva AS2. Situasi permintaan stok ini disebabkan oleh tindakan pemerintah yang tidak jelas dalam memberikan kebijakan ekonomi yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, dan masyarakat yang terkena dampak mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan masyarakat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, investor pasti akan sangat enggan untuk berinvestasi hingga situasi kembali normal. Kondisi permintaan persediaan ini menyebabkan kurva AD1 miring ke kiri menuju AD2. Terlihat dari kurva di atas, situasi produksi dimulai di Y1, menjadi Y2, dan berakhir di Y3. Produksi semakin bergeser ke kiri, yaitu menurun. Artinya, pendapatan pemerintah pada tahun 2020 akan menurun karena permintaan yang lebih rendah. Surplus Ekonomi Permintaan yang Menurun Dapat disimpulkan bahwa situasi pandemi COVID-19 saat ini telah memperburuk situasi perekonomian Indonesia secara signifikan.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal dengan harapan dapat memitigasi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk merevitalisasi dunia usaha, termasuk UMKM. Penyelenggaraan pemerintahan kota yang baik oleh sektor perekonomian di Pemerintah Kota Bandung dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan program revitalisasi perekonomian pemerintah pusat, dan sektor UMKM melakukan penguatan perekonomian dengan memberikan legalitas administrasi secara cuma-cuma. Dukungan fee dan permodalan melalui Volkskredit dan restrukturisasi pendapatan pembiayaan UMKM melalui Volkskredit (disingkat KUR). Pencapaian tujuan dan harapan masyarakat memerlukan sistem tata kelola kota yang baik dan efektif. Program tata kelola yang baik tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat.

Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan program percepatan legitimasi dan pembiayaan UMKM sebagai pendongkrak perekonomian untuk mencapai ketahanan UMKM belum sepenuhnya berhasil. Perlu dilakukan penilaian apakah program tersebut memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik di perkotaan. Sebagai program pemerintah pusat yang dianut oleh Kota Bandung, program ini setidaknya memerlukan pendanaan yang besar, dan keberhasilannya juga harus diukur dengan peningkatan ketahanan perekonomian Kota Bandung. Apa saja daya tarik usaha kecil dan menengah di kota ini, dan apakah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di kota ini dianggap efektif? Lebih khusus lagi, laporan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya tata kelola kota dan hubungan antara tata kelola kota yang baik dengan ketahanan perekonomian di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan teoritis dan panduan

praktis mengenai peran tata kelola kota dalam pembangunan berkelanjutan di bidang pemberian fasilitas kredit dalam rangka penguatan daya saing usaha mikro kecil menengah di Kota Bandung.

2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tata Kelola Kota yang Baik

Meyer dan Auriacombe (2019) menyatakan bahwa tata kelola kota yang baik dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan, pengelolaan dan tata kelola kota yang efektif, serta transparansi dan akuntabilitas dewan kota. Tata kelola yang baik melibatkan tiga pihak: pemerintah (administrasi negara), perekonomian korporasi atau dunia usaha, dan masyarakat sipil (mencari kesesuaian). Ketiga pihak ini mempunyai peranan yang sama dalam pengelolaan administrasi yang baik dan saling mempengaruhi. Sinkronisasi dan keharmonisan antar pihak yang terlibat menjadi kunci jawaban. Namun, mengingat situasi di Indonesia saat ini, hal ini masih sulit dilakukan. Keberhasilan mencapai tujuan suatu rencana pembangunan daerah P dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor perencanaan pembangunan daerah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Lingkungan, faktor lingkungan tersebut dapat berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Baik dari luar maupun dalam. Pengaruh eksternal seringkali datang dari daerah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam kerangka nasional dan internasional, sedangkan pengaruh internal berasal dari perencanaan daerah itu sendiri. Faktor yang terlibat adalah sosial, budaya, ekonomi dan politik. (2) Perencanaan sumber daya manusia, faktor sumber daya manusia merupakan penggerak kerja perencanaan. Perencanaan yang baik meningkatkan peluang Anda untuk menciptakan talenta hebat. Harus mendalam atau komprehensif, memerlukan pengetahuan luas di segala bidang. Elemen-elemennya mencakup perencanaan sumber daya alam, perencanaan sosial ekonomi, dan perencanaan tata ruang dan infrastruktur. (3) Sistem yang digunakan dalam sistem adalah peraturan atau petunjuk yang digunakan pada suatu wilayah/daerah tertentu sebagai landasan/landasan. melaksanakan rencana pembangunan. Elemen-elemennya mencakup prosedur, mekanisme penegakan hukum, pengambilan keputusan, dan verifikasi. Kesejahteraan pemerintah daerah selalu menjadi salah satu isu utama transformasi dan reformasi sektor publik internasional. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan alat dan instrumen untuk mengukur tata kelola kota yang baik.

Good Urban Governance Dimension	Instruments and Tools
Community participation and stakeholder involvement	Open council meetings
	Ward committee systems
	Open local media
	Suggestion boxes
	Public forums
	Telephone hotlines
	Promoting a sense of belonging and city vision
	Mayoral public meetings
	City referendums
	Public petitioning
	Participatory planning and budgeting sessions
	Capacity-building initiatives
	Administrative reform programs
	Continuous improvement exercises
Effective urban management and municipal administrations	Sound labor relations
	Effective systems, processes and procedures
	Performance monitoring and incentives
	Effective resource allocation and utilization
	Use of information and communication technology
	Applying control mechanisms
	External partners who monitor functions, decisions and activities
Council transparency and accountability	Rigorous procurement and accounting policies and practices
	Enforceable codes of conduct for political leaders and officials
	Information disclosure
	Independent complaints procedures
	Diversity in tenders and suppliers
	Decentralized decision-making
Access to economic opportunities	

Gambar 2. Instrumen dan Alat Untuk Tata Kelola Kota yang Baik

Sumber : Meyer dan Auracombie (2019)

Teori pembangunan dalam ilmu-ilmu sosial dapat dibagi menjadi dua paradigma utama: modernisasi dan ketergantungan (Lew Wellen 1995, Larrin 1994, Kiely 199). Paradigma modernisasi mencakup teori makro pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial serta teori mikro. Nilai-nilai pribadi yang mendukung proses perubahan. Menurut klasifikasi Larrain (1994), paradigma ketergantungan meliputi teori keterbelakangan, teori pengembangan ketergantungan, dan teori sistem dunia. Sebaliknya, mengklasifikasikan teori pembangunan ke dalam tiga kategori: modernisasi, keterbelakangan, dan ketergantungan. Dari paradigma-paradigma tersebut, muncul berbagai versi definisi pembangunan. Pengertian pembangunan mungkin yang paling menarik untuk dibahas. Mungkin tidak ada satu disiplin ilmu pun yang dapat mendefinisikan kata “pembangunan” dengan cukup baik. Selama ini pemikiran tentang pembangunan dipengaruhi oleh sosiologi klasik (Durkheim, Weber, Marx), perspektif Marxis, modernisasi Rostov, serta perspektif modernisasi dan strukturalis, yang memperkaya gagasan yang saya terima tentang pembangunan sosial. Namun, ada beberapa tema mendasar yang membentuk pesan tersebut.

Dalam konteks ini, pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih adil yang memenuhi dan memenuhi kebutuhan paling manusiawi dari seluruh warga negara (Nugroho & Dahuri, 2004). UNDP mengidentifikasi dua aspek utama tata kelola. Hal-hal tersebut adalah: (1) proses dan prosedur teknis untuk mobilisasi sumber daya, perencanaan, penerapan teknologi, dan alokasi sumber daya, dan (2) pengambilan keputusan.

Suatu proses pembangunan yang mencakup partisipasi, tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Bank Dunia sendiri fokus pada empat aspek utama tata kelola: (1) manajemen sektor publik, (2) akuntabilitas, (3) pengembangan kerangka hukum, dan (4) informasi dan transparansi publik. Tata kelola perkotaan yang baik dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah yang bertanggung jawab untuk secara efektif dan efisien merespons berbagai permasalahan pembangunan perkotaan dengan bekerja sama dengan penduduk setempat. Berikut beberapa prinsip yang sebaiknya diterapkan. Hal-hal tersebut adalah keberlanjutan, subsidiaritas, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat sipil atau warga negara, dan keamanan. Memasuki era otonomi daerah, pemerintahan kota terus mengalami perkembangan. Isu-isu yang dibahas dalam konteks ini mencakup keberlanjutan, subsidiaritas, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan sipil atau kewarganegaraan, dan keamanan. Dengan dimulainya otonomi daerah, pemerintahan daerah terus berkembang. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri dan kepentingan masyarakat.

2.2 Ketahanan Ekonomi

Menurut Meyer (2019), ketahanan perekonomian suatu wilayah mengacu pada kemampuannya menahan atau cepat pulih dari guncangan eksternal dan memperbaiki kondisinya dibandingkan dengan keadaan sebelum guncangan. Dalam ilmu ekonomi, ketahanan dapat dipahami sebagai pemulihan keseimbangan. Briguglio (2014) mengidentifikasi dua kondisi utama ketahanan ekonomi. Yang pertama adalah kemampuan meredam guncangan, dan yang kedua adalah kemampuan pulih dari guncangan. Ketahanan regional juga menjadi ukuran potensi untuk menilai dampak resesi terhadap suatu wilayah. Gagasan utama di balik ketahanan adalah untuk melihat bagaimana suatu sistem merespons dan pulih dari guncangan besar. Beuren *et al* (2016) menyatakan bahwa setiap guncangan atau krisis mempunyai karakteristik dan dampak yang unik terhadap perekonomian regional, dengan perbedaan skala dan durasi. Brokenleg (2012) mengkategorikan empat dimensi ketahanan regional terhadap resesi. Yang pertama adalah resistensi, kepekaan atau kedalaman respon terhadap guncangan. Yang kedua adalah pemulihan, yaitu kecepatan dan tingkat pemulihan dari dampak. Ketiga, reorientasi, yaitu kemampuan mengadaptasi perekonomian daerah dalam merespons guncangan baru. Yang keempat adalah pembaharuan, sejauh mana perekonomian regional akan memperbarui lintasan pertumbuhannya sebelum guncangan terjadi.

Dalam konteks pandemi COVID-19, hanya dimensi ketahanan pertama yang dapat dianalisis karena peristiwa tersebut masih berlangsung. Perlu diketahui bahwa tingkat ketahanan perekonomian daerah dapat dijelaskan oleh berbagai faktor, termasuk keragaman perekonomian daerah sebelum krisis. Dalam hal ini, tingkat keberagaman ekonomi di wilayah tersebut sama seperti sebelum pandemi COVID-19. Jika suatu wilayah mempunyai keberagaman ekonomi yang tinggi sebelum pandemi, kemungkinan besar wilayah tersebut akan menjadi lebih kuat selama pandemi berlangsung (Gong *et al.*, 2020; Tan *et al.*, 2020).

3 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah prosedur pemberian kredit. Unit pengamatan dalam penelitian ini adalah Bank dan Lembaga non bank penyalur Kredit Usaha Rakyat atau Kredit Korporasi. Satuan analisis sebagai sumber data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Sugiyono (2019) menyatakan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Mewawancarai ketua, pengurus dan anggota, karena mereka dianggap orang yang paling mengetahui mengenai apa yang di harapkan dan akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek yang diteliti.

Pertama-tama, dibandingkan dengan metode kualitatif lainnya seperti wawancara dan observasi, metode ini memerlukan waktu dan biaya yang lebih sedikit. Selain itu, sebagian besar arsip dapat diakses secara online di ruang publik dan karena tidak ada hubungan antarmanusia yang terlibat, maka tidak diperlukan persetujuan dari para anggota. Kesimpulannya, laporan bersifat terbuka, dapat diandalkan, dan tidak responsif, oleh karena itu laporan dapat diaudit beberapa kali tanpa pengaruh ilmuwan Bowen (2009) Karena tidak mengganggu, analisis dokumen mengurangi bias interaksi dan mendorong penyelidikan kontekstual dan konseptual (Babbie, 2001). Swart *et al* (2014) dengan referensi khusus pada berbagai dokumen, hasil analisisnya dapat diverifikasi. Buku teks akademis, artikel peer-review, dan buku tentang topik penelitian secara khusus digunakan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena dianggap kredibel, autentik, lengkap, dan representatif, serta diketahui sumber dokumennya. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut berkontribusi pada tujuan penelitian. Deskripsi kualitatif temuan terfokus pada konseptualisasi tema yang muncul dari Keberlanjutan penelitian. Untuk menemukan hubungan dan variasi antara tema dan hasil yang dihasilkan, informasi dibandingkan dan ditafsirkan.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Program Pembiayaan UMKM Merupakan Salah Satu Strategi Pengelolaan yang Baik Untuk Meningkatkan Keberlangsungan Perekonomian Kota Bandung

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak pemulihan perekonomian negara dengan cara merevitalisasi perekonomian masyarakat marginal telah memegang peranan penting. Urgensi peran UMKM menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung UMKM, termasuk melalui akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, pemerintah menargetkan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM dengan menetapkan batas atas KUR sebesar Rp373,17 triliun. Sejauh ini, total penyaluran KUR pada triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 93,340 miliar, dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,08%, dan total penyaluran KUR pada Juni 2022 diperkirakan mencapai 2,08% atau sebanyak 79,67 triliun rupiah dan akan meningkat secara signifikan. Sebagai penyedia kredit, Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi dari 0,76% terhadap PDB pada tahun 2016 menjadi 2,08% terhadap PDB pada triwulan I tahun 2022. KUR juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baru di Bandung yang mampu menyerap 12,6 juta tenaga kerja pada tahun 2021 (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2022). Evaluasi pelaksanaan penyaluran KUR Kota

Bandung semester I tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 41% dibandingkan bulan Juni 2021, sehingga Pemerintah Kota Bandung menetapkan target penyaluran KUR yang pada tahun 2023 sebesar Rp 373,17 telah tercapai.

Total KUR yang beredar sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 senilai Rp 507 triliun yang disalurkan kepada 35,96 juta debitur. Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Badan Kebijakan Pembiayaan UMKM dari penyalur KUR, terdapat 14,13 juta debitur pada tahun 2015 hingga 2022, yaitu 39% dari seluruh debitur yang mengakses KUR dan ditingkatkan pembiayaan. Selain itu, jumlah debitur baru juga semakin meningkat, dan pencapaian terbesar adalah program KUR mikro, dengan jumlah debitur melebihi 1,5 juta setiap tahun sejak tahun 2017, dan 2,8 juta debitur baru pada tahun 2021, total 68,72 juta debitur baru. Jumlah debitur akan meningkat pada tahun 2017. Seluruh jenis sistem KUR akan diluncurkan pada tahun 2021.

Relaksasi kredit UMKM diusulkan diperpanjang hingga April 2024, mengingat masih ada debitur KUR yang meminta keringanan karena operasional KUR belum sepenuhnya pulih. Pemerintah juga sedang membahas perlunya rencana penyaluran KUR dan anggaran subsidi bunga KUR dan mempercepat dan memfasilitasi akses yang lebih besar terhadap pembiayaan KUR bagi UMKM unbanked dan terdampak pandemi akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Pangsa pinjaman UMKM mencapai 30% dari total pinjaman pada tahun 2024. Pemerintah mencapai penyaluran KUR sebesar Rp470 triliun pada tahun 2023 dan Rp585 triliun pada tahun 2024.

4.2 Indonesia untuk Perjalanan UMKM: Kelembagaan dan Prinsip Perkreditan

Program penguatan usaha kecil dan menengah belum dimanfaatkan dan dioptimalkan secara maksimal. Pada tahun 1990-an, pengaruh ini digantikan oleh penerapan Program Mitra Bisnis secara institusional pada tahun 1992. Program Adopsi Usaha Kecil dimulai sebagai gerakan nasional pada awal tahun 1992, namun tidak terlalu berhasil. Kegagalan program ini pada hakikatnya mengharuskan perusahaan-perusahaan besar (termasuk swasta dan pemerintah) untuk membantu usaha kecil di berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, dan manajemen. Program ini tidak diperlukan bagi perusahaan besar, dan seperti program KUK, program adopsi merupakan program nasional yang tidak dapat mencapai tujuannya (Dewi, 2022). Sejak tahun 2000-an, kebijakan pemerintah Indonesia jelas berpihak pada usaha kecil dan menengah (UKM). Berbagai inisiatif dan langkah telah dilakukan untuk memperkuat UKM, dan pemerintah berkomitmen untuk mendukung UKM melalui sumber daya manusia, akses pasar, dan peningkatan permodalan. Akses terhadap kredit dinilai penting bagi UKM karena meningkatkan kebutuhan pembiayaan untuk operasional usaha dan meningkatkan akumulasi modal untuk pengembangan usaha yang lebih maju. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengusulkan program pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program KUR diharapkan para pemilik EME dapat menumbuhkan semangat untuk mengembangkan usahanya.

Melalui program KUR, diharapkan para pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) dapat menumbuhkan semangat untuk mengembangkan usahanya. Setelah memimpin SBY pada tahun 2007, kami meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan peluang perbankan bagi usaha kecil dan menengah dengan sistem agunan. Tujuannya untuk memudahkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, khususnya perbankan, terkait sumber kredit. Penyaluran KUR bertujuan untuk mendukung perolehan modal kerja dan investasi bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi yang kegiatannya layak dan produktif, namun belum bangkrut. Yang dimaksud dengan “unbankable” adalah usaha kecil dan menengah yang belum pernah meminjam atau baru mulai mengenal perbankan. Mereka biasanya memperoleh pinjaman dari pemberi pinjaman non-bank dengan suku bunga yang sangat tinggi, termasuk suku bunga bank. Oleh karena itu, permasalahan bagi usaha kecil bukanlah tingginya suku bunga, melainkan akses terhadap bank.

Berdasarkan laporan komisi KUR, Bank Nasional berkembang menjadi tujuh bank pada Desember 2012, yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri,

Bank Tabungan Negara (BTN), dan KUR yang dipecah menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Negara Indonesia (BSNI). Bank BRI menjadi penyalur KUR terbesar dengan jumlah maksimal Rp 59,2 triliun. Selain ritel, BRI juga menasar sektor mikro dengan limit Rp12,6 triliun dan Rp46,6 triliun, 766 UKM per peminjam, serta rata-rata kelayakan kredit Rp159,7 juta dan Rp6,6 juta. /Pembagian debitur dan pinjaman sebesar 3,1% dan jangka waktu pinjaman sebesar 1,7%. Di posisi kedua ada Bank Mandiri dengan Rp 10,79 triliun dan peminjam UKM 210 orang.453 orang, rata-rata jumlah pinjaman sebesar Rp 51,3 juta per peminjam dan kredit bermasalah sebesar 2,0%. Di peringkat ketiga ada BNI dengan total limit sebesar 10,67 triliun rupiah, jumlah peminjam UKM sebanyak 153.050 orang, rata-rata jumlah pinjaman sebesar 69,8 juta rupiah per peminjam dan tingkat kredit bermasalah sebesar 7,3%. Dari seluruh pinjaman yang diambil, jumlah UMKM yang didukung melalui KUR dengan menggunakan bank operasional tenaga pendukung koperasi pada akhir tahun 2023 sebanyak 29.135 UMKM dan 1.645 UMKM dengan jumlah pinjaman Rp. 67,472 juta. Total volume penyaluran KUR sebesar Rp97,6 triliun kepada 7,6 juta UKM per 31/12/2022. Hal ini memungkinkan setidaknya 7,6 juta UKM menerima modal dari bank pembangunan baik dalam bentuk pinjaman modal kerja maupun investasi. Artinya, masih banyak usaha kecil dan menengah yang belum menerima manfaat KUR, mengingat adanya informasi penyalahgunaan manfaat dan tujuan Kredit Rakyat.

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program KUR masih menghadapi berbagai kendala klasik akibat belum adanya kesatuan pemahaman mengenai KUR baik di kalangan bankir di daerah maupun masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini berdasarkan apa yang kami lakukan. Sesuai persyaratan yang ada, yang berhak menerima KUR adalah debitur komersial. Hal ini tentu saja menyulitkan bank pelaksana untuk menarik calon debitur dan memperluas penyaluran kredit. Akibatnya, banyak sumber daya yang masih digunakan secara kurang optimal. Kondisi ini membuat permasalahannya semakin parah. Tidak semua bank pelaksana KUR dapat membuka cabang atau melayani debitur di wilayah pemerintahan, terutama di daerah yang secara ekonomi tidak memungkinkan untuk membuka cabang. Begitu pula dengan pegawai rekening bank yang dapat menghubungi program KUR sangat terbatas, karena pegawai administrasi KUR tidak dapat langsung dihubungi. Selain itu, terdapat tantangan prosedural dalam mengakses KUR yang masih dihadapi oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan kelompok sasaran utama program ini. Sebab, seluruh tugas yang diberikan kepada staf lapangan meliputi pemasaran KUR mikro, analisis kredit, dan penagihan. Namun, kecuali pemerintah melakukan upaya khusus, bank khawatir akan sulitnya memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah meskipun mereka memenuhi syarat sebagai pinjaman korporasi. Pinjaman dapat diberikan. Bank-bank ini dituduh gagal menerapkan manajemen risiko berdasarkan praktik terbaik internasional, terutama mengingat usaha kecil dan menengah serta situasi makroekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat pemberdayaan UKM, pemerintah Indonesia sangat membutuhkan lembaga keuangan dan lembaga penjaminan yang dapat melaksanakan kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada badan usaha dan UKM yang membutuhkan permodalan. Petunjuk KUR memberikan pilihan kredit khusus bagi usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki agunan yang memadai, namun secara alamiah tunduk pada persyaratan sektor perbankan. Saat ini, inisiatif KUR mencakup pinjaman dari perbankan kepada usaha kecil dan menengah yang memenuhi persyaratan (feasible) namun belum bankable. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai prospek usaha dan profitabilitas yang baik. Sebanyak 4.444 UKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah mereka yang bergerak di sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi, seperti pertanian, perikanan, pelayaran, industri, kehutanan, dan jasa keuangan seperti tabungan dan kredit.

Penjualan KUR dapat dilakukan langsung oleh usaha kecil dan menengah melalui cabang atau kantor pembantu bank pelaksana. Untuk mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha mikro, penyaluran KUR juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui akses KUR melalui lembaga keuangan mikro, koperasi KSP/USP, atau kegiatan program kerjasama lainnya yang

bekerjasama dengan bank pelaksana. Melalui kebijakan KUR, pemerintah berupaya mendorong lembaga perbankan untuk menyalurkan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah. Peluncuran ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) mengenai penjaminan/pembiayaan kredit bagi UMKM dan koperasi antara pemerintah (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertanian) pada tanggal 9 Oktober 2007. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, surety company (Perum Sarana Usaha Pembangunan dan PT. Asuransi Kredit India) dan perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri). KUR didukung oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Bank Indonesia.

Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program kredit/pinjaman khusus bagi usaha kecil menengah dan koperasi yang usahanya menguntungkan namun tidak memiliki agunan yang cukup untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Tujuan akhir pelaksanaan program KUR adalah untuk meningkatkan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah akan meningkatkan akses UMKM dan koperasi terhadap kredit/pinjaman dari perbankan dengan meningkatkan kapasitas perusahaan penjaminan. Hal ini akan membantu usaha kecil menengah dan koperasi mengatasi kesulitan memperoleh pinjaman dan pinjaman dari bank karena kurangnya agunan. Kriteria usaha kecil dan menengah yang berhak menerima KUR menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UU UMKM). Pokok-pokok Pasal 1 adalah (1), (2), dan (3). Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau usaha tersendiri yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM. Usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perusahaan menengah atau besar. Standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah.

5 SIMPULAN

Mengingat perkembangan kredit populer dan tren kredit bermasalah yang semakin meningkat di Jawa Barat, hendaknya Bank Indonesia mengajukan permohonan agar proses kredit dilakukan secara hati-hati (pendekatan kehati-hatian). Situasi kredit bermasalah terkonsentrasi pada sektor pertambangan sebesar 88,41%, dengan jumlah kredit terbesar terkonsentrasi pada sektor komersial dan jasa. Berdasarkan pantauan Bank Indonesia, meskipun kredit ini dijamin, namun faktanya kredit ekonomi tersedia tanpa agunan/jaminan telah berkembang di masyarakat. Ini murni komersial karena sifatnya komersial. Meskipun pemerintah menjamin 70% penyaluran melalui PT ASKRINDO dan PERUM JAMKRINDO dan 30 perusahaan sisanya mendukung program penjaminan, namun penggunaan dana pihak ketiga dari masing-masing bank pelaksana tentu membawa risiko bisnis yang sangat tinggi akan diterapkan oleh masing-masing bank pelaksana, dengan ketentuan adanya tambahan agunan/jaminan oleh debitur KUR.

Menurut Bank Indonesia, penerapan sistem informasi debitur sangat penting untuk menganalisis kinerja debitur KUR itu sendiri. Ide di balik diperkenalkannya sistem informasi debitur yang disebut juga BI-Checking ini adalah masih banyak UMKM yang tidak terdampak oleh pinjaman perbankan atau sekitar 83% dari seluruh UMKM. SID berharap dapat menjangkau kelompok sasaran tersebut, karena penerima KUR diharuskan untuk tidak pernah memperoleh fasilitas kredit seperti fasilitas kartu kredit atau sewa pembiayaan. Namun dengan meningkatnya kredit usaha rakyat, bank pelaksana semakin sulit mencari debitur baru karena hampir seluruh atau sebagian besar usaha kecil dan menengah terkena dampak dari kemungkinan tersebut. Oleh karena itu, sangat sulit menemukan debitur atau pemegang kartu kredit yang belum pernah menerima pinjaman konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga penyaluran KUR dapat lebih tepat sasaran kriteria penerima KUR

dan fasilitas yang disewakan. Oleh karena itu, calon penerima KUR dapat diidentifikasi sebagai debitur yang belum pernah mendapatkan jalur kredit produktif.

Namun untuk mencegah terjadinya perbedaan, maka pada SID ini harus ditetapkan batasannya, misalnya jika penerima KUR kemungkinan besar akan menggunakan dana kredit untuk melunasi utang pinjaman konsumen toleransi. Misalnya batas atas KUR kurang dari Rp.25 juta untuk meminimalkan risiko kredit. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat telah menangkap dua tersangka kasus korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2020 hingga 2021, terdapat penyimpangan dalam pemberian kesejahteraan kepada masyarakat miskin. Penggelapan dana tersebut dilakukan dengan memalsukan identitas dan tanda tangan penerima manfaat, namun ternyata merupakan penarikan dana KUR mikro. Tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh oknum bank pemerintah di Kota Bandung yang menjadi sumber utama dana KUR.

Perlu diketahui, tata kelola kota yang baik berdasarkan program KUR di Kota Bandung pada tahun 2021 hingga 2023 belum dapat dikatakan berhasil dan optimal dilaksanakan karena tidak tercapainya penghargaan KUR AWARD dan penyelewengan dana bantuan. Melalui bank penyalur yang tidak bermoral. Hal ini merupakan catatan Pemerintah Kota Bandung yang terus meningkatkan pelaksanaan program dan tata kelola yang baik, khususnya pada indikator efisiensi dan transparansi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Auriacombe, C., & Walt, G. van der. (2021). Fundamental policy challenges influencing sustainable development in Africa. *Africa's Public Service Delivery & Performance Review*, 9(1), 2021. <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v9i1.381>
- Babbie, E. (2001). *The Practice of Social Research*. Wadsworth Thomson.
- Beuren, I., Politelo, L., & Martin, J. (2016). Influence of Family Ownership on Company Performance. *International of Managerial Finance*, 12(5).
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Briguglio, L. (2014). A Vulnerability and Resilience Framework for Small States. *Building the Resilience of Small States: A Revised Framework*. <https://doi.org/10.14217/9781848599185-5-en>
- Brokenleg, M. (2012). Transforming Cultural Trauma into Resilience. *Reclaiming Children and Youth*, 21(3), 9–13.
- Dewi, A. P. (2022). Strategi Pemasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia. *Journal of Accounting Taxing and Auditing*, 3(2), 39–45. <https://doi.org/10.57084/jata.v3i2.891>
- Gibson, J., & Olivia, S. (2020). Direct and Indirect Effects of Covid-19 On Life Expectancy and Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 325–344. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1847244>
- Gong, H., Hassink, R., Tan, J., & Huang, D. (2020). Regional Resilience in Times of a Pandemic Crisis: The Case of COVID-19 in China. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 111(3), 497–512. <https://doi.org/10.1111/tesg.12447>
- Kemenkeu RI. (2022). *Menyongsong Era Kebangkitan Pasca Pandemi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Latifa, N. (2013). *Tata Kelola Kota dalam Kerangka Otonomi Daerah*. LIPI.
- Maloba, T., & Auriacombe, C. (2019). Citizen Participation in the Developmental State. *Admiral Publica*, 27.
- Meyer, N., & Auriacombe, C. (2019). Good urban governance and city resilience: An afrocentric approach to sustainable development. *Sustainability (Switzerland)*, 11(19), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su11195514>

- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES.
- Obeng-Odoom, F. (2012). Far Away from Home: The Housing Question and International Students in Australia. *Journal of Higher Education Policy and Management*.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Swart, J. J., Swanepoel, M. J., & Surujlal, J. (2014). A critical analysis of government spending on sport: Mass participation and school allocation. *African Journal for Physical*, 2(2), 251–265.
- Tan, B. Y. Q., Chew, N. W. S., Lee, G. K. H., Jing, M., Goh, Y., Yeo, L. L. L., Zhang, K., Chin, H. K., Ahmad, A., Khan, F. A., Shanmugam, G. N., Chan, B. P. L., Sunny, S., Chandra, B., Ong, J. J. Y., Paliwal, P. R., Wong, L. Y. H., Sagayanathan, R., Chen, J. T., ... Sharma, V. K. (2020). Psychological impact of the COVID-19 pandemic on health care workers in Singapore. *Annals of Internal Medicine*, 173(4), 317–320. <https://doi.org/10.7326/M20-1083>
- Urbanresiliencehub. (2024). *Pusat Ketahanan Perkotaan*. Urbanresiliencehub.Org. <https://urbanresiliencehub.org/what-is-urban-resilience/>
- Waldt, G. van der, & Fourie, D. (2022). Ease of Doing Business in Local Government: Push and Pull Factors for Business Investment in Selected South African Municipalities. *World*, 3(3), 470–486. <https://doi.org/10.3390/world3030025>